

Peran Strategis Napoléon Bonaparte dalam Konstitusi Prancis

DJOKO MARIHANDONO

Staf Pengajar Program Studi Prancis Fakultas Ilmu Budaya (FIB)
dan Program Kajian Wilayah Eropa Program Pascasarjana Universitas Indonesia

Abstract

Napoléon Bonaparte was a great French Emperor. Based on the constitution of 22 Frimaire l'an VII (December 13, 1799) Napoléon Bonaparte took place the Directory Governance as *First Consul (Premier Consul)* together with *Combacères* as *Second Consul* and *Lebrun* as *Third Consul*. As *First Consul*, Napoléon Bonaparte had a special right than the others. He took role as Chief of State. In this constitution, it was written that Bonaparte was pointed as *First Consul*. It means that the constitution was made for him. Based on the amandement of the constitution in 1802, dated 16 Thermidor l'An X I August 4, 1802), the constitution mentioned Napoléon as *The Longlife Consul*. This condition brought out many consequences, especially in all over French Metropolitan. Napoléon became a dictator. He had right to govern alon without consulting with other highest principal institutions. After a murder trial to Napoléon, French People send a petition to the parliament to change the form state into a Kingdom State. Therefore, based on the Constitution of 28 Floréal l'An XII (May 18, 1804), the Franche state became a French Kingdom. Napoléon Bonaparte was pointed as French Emperor. He received full executive power. He arranged all the country as a modern state and built transnational roads connecting Paris with 25 other countries in Europe. Napoléon brought French Nation to be a great country and he integrated many countries under his authority.

Keywords: Napoléon Bonaparte, Politik, Konstitusi, Prancis modern

Latar belakang

Dalam sejarah politik Prancis, para sejarawan membagi periodisasi Prancis setidaknya dalam beberapa periode: bermula dari masa Rezim Lama (*Ancien Régime*) yang dikenal sangat otoriter, diikuti dengan masa Revolusi Prancis (*Revolution française*) yang mengubah secara total politik Prancis serta tatanan sosial budaya masyarakat Prancis. Tiga tahun setelah

terjadinya Revolusi Prancis (1792), tatanan politik di Prancis berubah lagi dengan didirikannya sistem pemerintahan *Convention* di Prancis, yang juga dikenal sebagai Republik Prancis Pertama. Pendirian Republik Pertama ini ditandai dengan diberlakukannya sistem penanggalan baru yang dimulai pada tanggal 22 September 1792 – dikenal dengan istilah *L'an Premier* (Tahun Pertama), Republik Pertama

Prancis diproklamkan 22 September 1792 (Nembrini 1985:89). Pada masa awal pemerintahan *Convention* ini, Prancis dipimpin beberapa orang yang mewakili kelompok-kelompok militan yang ada pada saat itu. Kaum Girondin yang berpandangan moderat di bawah pimpinan Danton berkoalisi dengan kaum Montagnard yang bergaris keras di bawah pimpinan Robespierre.

Dari kedua kelompok militan ini, dibentuklah pemerintahan *Terreur*, yang diketuai kelompok Montagnard, didukung kelompok *Sans-Culottes*. Pemerintahan *Terreur* ini bertugas menyelamatkan Revolusi Prancis dari musuh-musuh, baik yang berasal dari dalam negeri maupun ancaman dari negara-negara tetangga yang merasa terancam dengan tersebarnya paham revolusi ini. Oleh karena itu, untuk menyelamatkan Revolusi Prancis, dibentuklah *Comité de Salut Public* (Komite Keselamatan Publik) sebagai lembaga resmi pemerintah yang akan melacak musuh-musuh revolusi. Akibatnya, selama 18 bulan setelah dibentuknya lembaga ini, lebih dari 30 ribu orang Prancis mati dengan cara dipancung. Pemerintahan *Terreur* diakhiri pada 27 Juli 1794 setelah pemimpinnya (Robespierre) ditangkap dan menjalani hukuman pancung karena menolak untuk membubarkan pemerintahan *Terreur*.

Sementara itu, sebagai akibat dari dilaksanakannya hukuman pancung terhadap Raja Prancis Louis XVI dan isterinya Marie Antoinette pada tahun

1793, Prancis terancam dengan rencana invasi pasukan Austria ke Prancis, karena Marie Antoinette masih memiliki hubungan kerabat dekat dengan Raja Austria. Akibat dari ancaman ini, rakyat Prancis bangkit dan bergabung dengan tentara Prancis. Mobilisasi pasukan terjadi di mana-mana. Salah satunya adalah mobilisasi para sukarelawan dari kota Marseille. Mereka berjalan menyusuri kota itu sambil menyanyikan lagu *La Marseillaise*, yang kelak dijadikan lagu kebangsaan Prancis.

Pembubaran pemerintahan *Terreur* ditindaklanjuti dengan pembentukan sistem pemerintahan *Directoire* pada tahun 1795. Pucuk pemerintahan Prancis dipimpin 5 orang direktur, yakni: La Reveillère-Lépaux, Reubell, Sieyès, Letourneur, dan Barras.¹ Tugas yang dibebankan ke kelima direktur ini antara lain mengatur keamanan di dalam negeri (kepolisian), administrasi pusat dan daerah, menjalankan undang-undang yang sudah diputuskan oleh lembaga legislatif. Namun, secara garis besar, kelima direktur ini memiliki 2 tugas utama, yakni menata ekonomi Prancis pascarevolusi dan menyusun kekuatan untuk mengalahkan negara-negara yang menjadi musuh Revolusi.

¹ Pemerintahan *Directoire* yang terdiri atas lima orang direktur pada awal berdirinya pemerintahan ini, berubah menjadi 3 orang direktur tahun 1797 yang semuanya berasal dari kelompok Republikan. Ketiga direktur ini disebut sebagai *Triumvirat* yang terdiri atas Barras, Reubell, dan La Reveillère-Lépaux (Godechot 1970:143).

Kondisi angkatan bersenjata Prancis pada masa ini tidak terkoordinasi dengan baik. Hal ini terbukti dengan kondisi tentara Prancis yang tidak mau mengikuti perintah komandannya, seperti pada masa Cromwell, Monck, La Fayette, Doumoriez. Bahkan komandan Augerau lebih banyak menghabiskan waktunya untuk berdebat dengan para politisi Prancis daripada mengurus anak buahnya di dinas kemiliteran. Saat itu muncullah seorang opsir muda kelahiran Korsika bernama Napoléon Bonaparte (selanjutnya disebut Napoléon). Berkat kecakapannya di bidang militer, ia berhasil mengalahkan pasukan gabungan Austria dan Prusia di Italia, bahkan berhasil memaksa musuh untuk menandatangani perjanjian Campoformio pada tahun 1797. Keberhasilannya memenangkan perang di Italia mengangkat dan melambungkan namanya. Keberhasilannya disambut hangat oleh semua warga negara Prancis. Bersamaan dengan itu, Prancis ingin menguasai wilayah Mesir yang saat itu berada di bawah kekuasaan Inggris. Untuk memperjuangkan kepentingan Prancis di wilayah itu, ia ditugaskan untuk memimpin pasukan dalam upaya menghancurkan armada Inggris di Mesir.

Sementara itu di Paris, upaya penataan kembali ekonomi Prancis di bawah pimpinan para direktur tidak berhasil dilakukan. Bahkan, keadaan Paris dan sekitarnya menjadi genting akibat pertentangan yang timbul

antara kaum republikan dan kaum royalis, yang mengarah kepada perang saudara. Rakyat Prancis yang sedang mengalami euforia kehebatan Napoléon, mendesak pemerintah untuk memanggilnya, untuk menyelesaikan kemelut yang terjadi di pusat pemerintahan di Paris. Napoléon akhirnya memutuskan untuk kembali ke Paris. Ia melakukan kudeta tak berdarah dengan menginstruksikan tentaranya untuk menyerbu lembaga legislatif (Dewan 500) yang saat itu sedang bersidang. Ia mengambil alih pemerintahan dan meminta kepada dewan untuk menyusun konstitusi baru yang dipimpin oleh 3 orang saja.

Konstitusi yang disusun tanggal 22 *Frimaire* tahun VII (13 Desember 1799) baru diresmikan berlakunya oleh *Sénat* tanggal 25 Desember 1799. Konstitusi ini mendasari pembentukan pemerintahan yang diberi nama pemerintahan *Consulat* karena dipimpin oleh tiga orang konsul. Ketiga orang konsul itu adalah Napoléon sebagai Konsul Pertama (*Premier Consul*), Combacères sebagai konsul kedua, dan Lebrun sebagai konsul ketiga. Setelah dua tahun berjalan, *Sénat* mengusulkan untuk menyelenggarakan referendum, untuk meminta pendapat rakyat Prancis tentang usulan pengangkatan Napoléon menjadi Konsul seumur hidup. Hasil Referendum yang diselenggarakan pada tanggal 20 *Floréal* tahun X (10 Mei 1802) dituangkan dalam amandemen konstitusi tanggal 14 *Thermidor* tahun X (2 Agustus 1802), yang

mengangkat Napoléon sebagai Konsul seumur hidup (*Consul à Vie*).²

Pengangkatan Napoléon menjadi konsul seumur hidup tetap belum membawa keamanan di dalam negeri. Untuk menyalurkan aspirasi bangsa Prancis yang menginginkan agar Napoléon diangkat menjadi Raja Prancis, disambut oleh Senat dengan melaksanakan referendum untuk meminta pendapat rakyat. Berdasarkan hasil referendum itu, diresmikanlah konstitusi baru Prancis tanggal 28 *Floréal* tahun XII (18 Mei 1804) yang mengubah sistem kenegaraan di Prancis dari sistem republik menjadi kekaisaran yang diberi nama Kekaisaran Pertama Prancis (*Premier Empire*) sekaligus mengangkat Napoléon Bonaparte sebagai Kaisar Prancis yang pertama (pasal 1 dan 2).

Konstitusi ini memberikan kekuasaan yang besar pada lembaga eksekutif. Konstitusi tahun 1804 ini berlangsung cukup lama, hingga tahun 1814, ketika diberlakukan konstitusi yang baru pada tanggal 4 Juni 1814, setelah Napoléon ditangkap oleh Inggris dan dibuang ke pulau Elba.

Berdasarkan uraian historis periode Napoléon Bonaparte di atas, yang menjadi masalah dalam artikel

ini adalah: apa perbedaan antara sistem pemerintahan rezim lama dan rezim setelah revolusi di Prancis. Apa kedudukan Napoléon Bonaparte dalam sistem pemerintahan di Prancis dan bagaimana kedudukan itu tertuang dalam konstitusi Prancis. Adapun batasan temporal dalam penulisan ini adalah sejak Napoléon menduduki jabatan tertinggi di Prancis (*Premier Consul*) pada tahun 1799 hingga Napoléon tertangkap dan dibuang ke pulau Elba tahun 1814.

Sistem Ketatanegaraan Prancis Sebelum Revolusi 1789

Sistem kekuasaan pemerintahan kerajaan di Prancis (rezim lama) mulai memasuki era penguatan kerajaan (*renforcement de la royauté*) pada abad XVI dan XVII, bermula dari masa pemerintahan Kaisar François I. Pada masa pemerintahannya (1515–1547) raja menjadi penguasa absolut dan para penduduk diharuskan untuk memanggil raja dengan sebutan *Votre Majesté* (Yang Mulia). Melalui upacara yang suci, para raja dan keturunannya dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia. Mereka itu dianggap sebagai raja dan harus menjalankan hukum Tuhan. Mereka yang melawan raja berarti melawan Tuhan (Nembrini, 1985: 69). Pada masa ini, di setiap daerah ditunjuk wakil raja (*les Intendants*), yang berkewajiban untuk menjalankan fungsi peradilan, keamanan dan keuangan di wilayahnya masing-masing. Wakil raja di daerah sebelumnya memiliki otonomi

² Lihat pasal 1 amandemen tanggal 14 *Thermidor* tahun X, "*Le Peuple français nomme, et le Sénat proclame Napoléon Bonaparte Premier Consul à Vie*" 'Rakyat Prancis mengangkat dan Senat memutuskan Napoléon Bonaparte sebagai Konsul Seumur hidup'.

untuk mengambil kebijakan dan menjalankan kekuasaannya masing-masing.³

Menurut catatan sejarah Prancis, pemerintahan Louis XIV (1643-1715) dianggap sebagai pemerintahan kerajaan yang absolut. Ia memerintah seorang diri. Negara berada di bawah kekuasaannya. Dengan ucapannya yang sangat terkenal "*L'Etat c'est moi!*" "negara adalah saya" menjadikan Louis XIV sebagai raja yang sangat berkuasa. Sebagai negara yang paling kuat di Eropa, Prancis di bawah pemerintahan Louis XIV berhasil membangun istana yang sangat mewah di luar kota Paris, yaitu istana Versailles, yang digunakan sebagai istana raja.

Kekuasaan raja pada masa Rezim Lama tidak terbatas. Raja memiliki kekuasaan yang berasal dari Tuhan (*droit divin*). Menentang keputusan raja berarti menentang Tuhan. Oleh

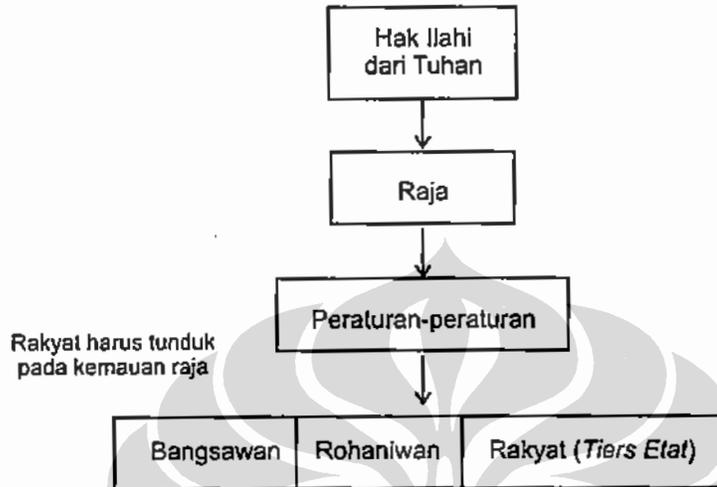
karena itu, pelantikan raja yang baru selalu melibatkan pihak gereja. Gereja (dalam hal ini Paus) yang harus melantik raja baru di Prancis. Raja berhak mengatur rakyatnya dengan mengeluarkan peraturan-peraturan (*edit*) yang harus dipatuhi oleh rakyatnya (Nembrini 1985:90). Sistem pemerintahan dijalankan secara sentralistik, karena semua kekuasaan itu bertumpu pada raja, sehingga tidak perlu ada konstitusi. Kekuasaan tertinggi ada padanya dan yang berhak untuk memimpin rakyat adalah mereka yang berasal dari kalangan istana.

Dalam kehidupan sehari-hari raja Prancis dapat dengan mudah menangkap dan memenjarakan seseorang atau sekelompok orang tanpa putusan pengadilan. Kaum cendekiawan Prancis secara diam-diam mempelajari apa yang terjadi di luar negara Prancis, khususnya di Inggris. Di negara ini, pada tahun 1679 mulai diundangkan *Habeas Corpus*, yaitu undang-undang yang melarang memenjarakan seseorang atau sekelompok orang tanpa melalui proses peradilan. Undang-undang itu juga mengatur tata cara menaikkan pajak yang harus disetujui oleh wakil rakyat di parlemen.

Struktur kekuasaan pemerintahan Prancis pada masa rezim lama, terdiri atas lembaga eksekutif, dan lembaga legislatif. Lembaga eksekutif dipimpin oleh raja, dan dibantu oleh tiga lembaga, yakni para menteri (*ministres*), dewan pertimbangan (*conseils*), dan wakil raja di daerah

³ Masa sebelum menguatnya kerajaan, tanah-tanah dikuasai oleh tuan tanah (*Seigneurs*). Selain memiliki lahan yang luas, mereka juga menjadi wakil raja di daerah yang memiliki otonomi untuk memerintah bahkan untuk memiliki pasukan sendiri. Untuk menghindari ancaman serangan dari wilayah lain, para tuan tanah ini bekerjasama dengan para pangeran dan bangsawan dan membentuk pertahanan wilayah bersama. Sebagai imbalannya para tuan tanah ini harus menyediakan sebagian tanahnya bagi mereka yang disebut sebagai *fief*. Selain memiliki hak untuk membentuk pasukan sendiri, para tuan tanah juga memiliki hak untuk menarik pajak dan menjalankan fungsi peradilan. (Nembrini 1985 :37).

Gambar 1. Bagan Struktur Pemerintahan Masa Rezim Lama



(Nembrini 1986:90 diterjemahkan)

(*intendants*) (Hinnewinkel 1981:67).

- a) Para pejabat setingkat menteri seperti Kepala Perwakilan Pengadilan (*Le chancelier, chef de la justice*), Pemeriksa Keuangan (*Le contrôleur général des finances*), dan Sekretaris Negara urusan Luar Negeri, Perang, Kelautan, dan Urusan Istana (*Les secrétaires d'État: Affaires étrangères, Guerre, Marine, Maison du Roi*);
- b) Dewan pertimbangan terdiri empat bidang, yakni: bidang semua urusan penting (*affaires importantes*), bidang keuangan (*finances*), peradilan (*justice*), dalam negeri (*relations avec les provinces*);

- c) Wakil raja di daerah (*Intendants*) memiliki kekuasaan bidang peradilan, keamanan, dan keuangan. Lembaga legislatif yang beranggotakan wakil-wakil dari kelompok masyarakat berfungsi untuk membantu raja. Lembaga legislatif ini disebut Dewan Perwakilan Rakyat (*Etats Généraux*) yang beranggotakan wakil-wakil dari ketiga kelompok, yakni kelompok bangsawan, rohaniwan dan kelompok rakyat. Fungsi Wakil-wakil rakyat (*député*) ini adalah untuk membantu raja. Raja dapat meminta bantuan pemikiran melalui sidang Dewan Perwakilan Rakyat. Pada masa rezim lama, administrasi kerajaan sangat

kompleks dan tidak rasional. Sistem pemungutan suara dilakukan melalui kelompok, dan tidak dihitung per kepala (Godechot 1970: 6-7).

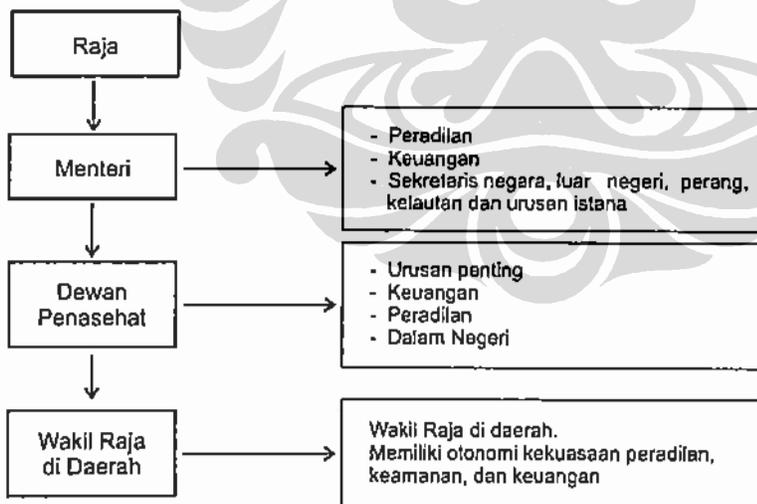
Dalam sistem ini, kekuasaan terpusat pada raja. Kedaulatan berada sepenuhnya di tangan raja. Tidak ada satu lembaga pun yang berhak untuk mengontrol maupun mengoreksi apa yang sudah diputuskan oleh raja. Oleh karena itu, sistem pemerintahan pada masa rezim lama disebut sebagai sistem monarki absolut.

Para wakil raja di daerah memiliki otonomi untuk menjalankan kekuasaan, menjalankan fungsi peradilan, membentuk tentara untuk pertahanan dan menentukan kebijakan pajak dan keuangan. Mereka memiliki otonomi untuk menjalankan pemerintahannya sendiri-sendiri.

Sistem Ketatanegaraan Prancis Setelah Revolusi 1789

Revolusi Prancis yang terjadi pada tahun 1789 mengubah sistem kekuasaan pemerintahan Prancis secara menyeluruh. Kekuasaan raja yang dianggap semula berasal dari Tuhan, setelah terjadinya revolusi Prancis berubah, yaitu berada di tangan seluruh warga negara Prancis yang disebut sebagai bangsa Prancis (*La nation*). Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Melalui Dewan Perwakilan Rakyat konstitusi dan undang-undang dibuat. Semua undang-undang yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif harus dilaksanakan oleh lembaga eksekutif. Pemisahan kekuasaan legislatif dan eksekutif ini menjadi dasar sistem pemerintahan yang demokratis.

Gambar 2. Bagan Struktur Kekuasaan Kerajaan pada Masa Rezim Lama (*Ancien Régime*)



(Hinneuwinkel M.J. 1981:67 diterjemahkan)

Konstitusi membatasi kekuasaan legislatif dan eksekutif serta melindungi semua warga negara (*citoyens*). Namun, dalam tahap awalnya, hanyalah warga negara terkaya yang berhak memilih dan dipilih menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (*Assemblée Nationale*). Semua warga negara harus tunduk kepada konstitusi. Secara umum, perubahan sistem kenegaraan setelah Revolusi Prancis dapat dilihat pada gambar 3.

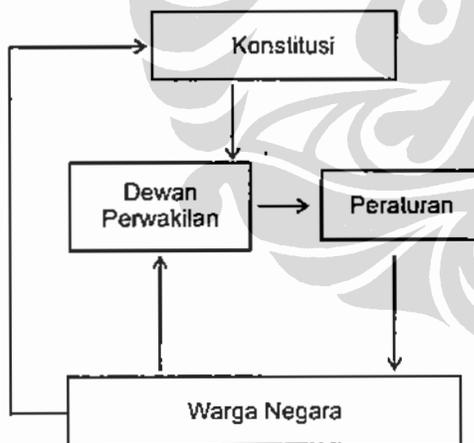
Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Hanya warga negara yang kaya yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Warga negara yang memiliki hak

untuk memilih, menentukan wakil-wakilnya yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan ini membuat undang-undang, yang harus dipatuhi oleh semua warga negara Prancis.

a. *Sistem Pemerintahan Prancis Berdasarkan Konstitusi Konsulat 22 Frimaire Tahun VIII (13 Desember 1799)*

Setelah Napoléon melakukan kudeta tidak berdarah, disusunlah konstitusi 22 *Frimaire* tahun VIII (13 Desember 1799) yang baru disahkan berlakunya pada tanggal 25 Desember 1799. Pemerintahan yang dibentuk yang mendasarkan pada konstitusi ini disebut pemerintahan *Consulat*. Secara garis besar, bagian pertama konstitusi ini berisi tentang hak yang dimiliki oleh warga negara. Bab II dan III berisi tentang lembaga legislatif yang terdiri atas Senat yang beranggotakan 80 orang, dan untuk pertama kalinya anggota Senat itu diangkat. Para senator yang merupakan utusan daerah ini secara politis sangat bebas, namun pada kenyataannya mereka sangat lemah, karena kekuasaan legislatif menjadi terbagi dengan Badan Legislatif yang beranggotakan 300 orang hasil pilihan rakyat. (Godechot 1970: 149). Bagian IV dari konstitusi ini merupakan bagian yang terpenting karena berisikan tentang kekuasaan pemerintah, yaitu Konsul (*Consulat*), para menteri dan Dewan Negara (*Conseil d'Etat*). Konsul pertama (*Premier Consul*) adalah kepala negara yang menerima kekua-

Gambar 3.
Bagan Struktur Pemerintahan
Masa Setelah Revolusi



(Nembrini 1986:90 diterjemahkan)

saan yang sangat luas, jauh melebihi kekuasaan legislatif. Hak untuk memutuskan berada pada Konsul Pertama, sementara Konsul Kedua dan Ketiga hanya menjalankan fungsi menjadi penasihat saja. Konstitusi 25 Desember 1799 ini berisikan 8 bab yang terurai dalam 95 pasal.

Dalam pasal 39 disebutkan bahwa pemerintahan di Prancis berdasarkan konstitusi ini dipimpin oleh tiga orang konsul yang dipilih warga negara. Konstitusi ini mengangkat Bonaparte sebagai Konsul Pertama, Cambacérès sebagai Konsul Kedua, dan Lebrun sebagai Konsul Ketiga. Masa jabatan ketiga konsul ini hanya lima tahun.

Gaji para pemimpin negara ini dituangkan dalam pasal 43. Konsul pertama akan menerima gaji sebesar 500 ribu *franc*, sementara dua konsul

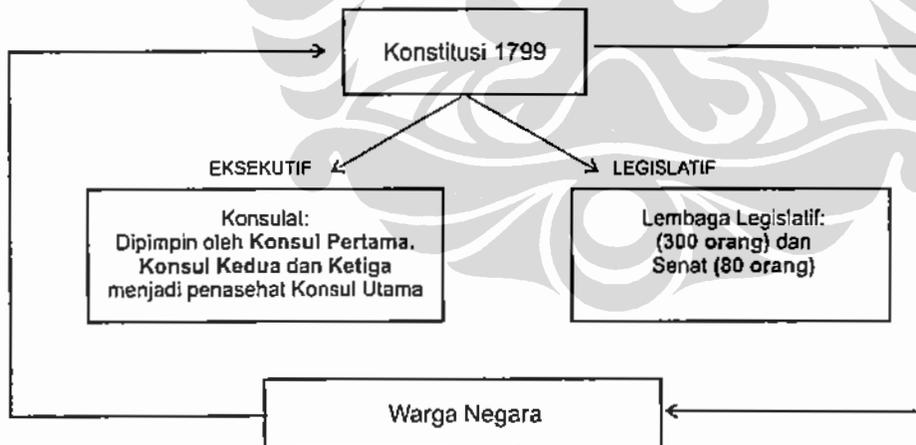
lainnya akan menerima gaji sebesar 3/10 dari gaji konsul pertama. Secara umum sistem kenegaraan berdasarkan konstitusi tanggal 22 *Frimaire* tahun VIII dapat dilihat di gambar 4.

b. Sistem Pemerintahan Prancis

Berdasarkan Konstitusi Konsulat 16 Thermidor Tahun X (4 Agustus 1802)

Konstitusi tanggal 25 Desember 1799 hanya berumur kurang dari 3 tahun. Konstitusi ini diganti sebagai jawaban atas reaksi masyarakat yang menghendaki agar Napoléon Bonaparte diangkat sebagai Konsul Seumur Hidup (*Consul à Vie*) sebagai upaya untuk menciptakan keamanan di negeri itu, akibat adanya ketidaksepahaman di antara ketiga konsul itu.

Gambar 4. Struktur Kekuasaan Pemerintahan Berdasarkan Konstitusi 22 *Frimaire* tahun VIII (13 Desember 1799)



Oleh karena itu, untuk menyalurkan aspirasi masyarakat, pemerintah menyelenggarakan refe-rendum, dengan meminta pendapat rakyat atas pertanyaan: *Apakah rakyat Prancis menyetujui Napoléon Bonaparte diangkat untuk menjadi Konsul Seumur Hidup?* Rakyat di setiap *commune*⁴ harus diundang untuk menyalurkan pendapatnya. Waktu pelaksanaan pendapat rakyat hanya berlangsung selama tiga minggu.

Berdasarkan hasil surat suara yang terkumpul, 500 ribu warga menyetujuinya, sementara hanya 1.562 warga yang menolaknya. Oleh karena itu, Senat mengumumkan hasil referendum ini pada tanggal 14 *Thermidor* tahun X (2 Agustus 1802) yang menindaklanjuti hasil pemungutan suara itu dengan mengganti konstitusi lama dengan konstitusi baru yang mulai diberlakukan pada tanggal 16 *Thermidor* tahun X (4 Agustus 1802).

Konstitusi ini terdiri dari 10 bab, terbagi dalam 86 pasal. Secara garis besar isi konstitusi ini adalah sebagai berikut: Bab I mengatur tentang pembagian sistem administrasi di Prancis. Bab II terdiri atas 14 pasal, mengatur tentang Dewan Kelurahan (*Assemblée de canton*). Bab III yang terdiri atas 20 pasal mengatur tentang tata cara pelaksanaan pemilihan

umum. Bab IV terdiri atas 23 pasal mengatur tentang konsul. Bab V sampai dengan IX mengatur tentang lembaga negara lainnya, dan bab X, yang terdiri atas 1 pasal, mengatur tentang pemberian grasi.

Bab IV, secara khusus mengatur tentang para konsul. Konsul Pertama dipilih langsung oleh rakyat; sementara Konsul Kedua dan Konsul Ketiga diputuskan oleh Senat berdasarkan atas usulan Konsul Pertama (Pasal 40 dan 42). Masa jabatan Konsul Pertama adalah seumur hidup dan hanya bisa digantikan apabila ia meninggal dunia (pasal 43). Warga negara yang terpilih menjadi Konsul Pertama harus mengangkat sumpah di hadapan kedua konsul lainnya, anggota Senat, para menteri, penasehat Negara, lembaga legislatif, lembaga peradilan, ketua Dewan kelurahan, dan 82 wakil dari *département* di Prancis.

Konsul Pertama memiliki hak untuk memberikan grasi, setelah berkonsultasi dengan hakim agung, dua menteri, dua anggota Senat, dua anggota penasehat negara, dan dua Hakim di Pengadilan tingkat Kasasi (Godechot 1970: 167-177). Sebagai Konsul Pertama Napoléon memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Hanya dia sajalah yang memiliki hak untuk mengusulkan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (*Sénat*). Sementara itu, mayoritas anggota dewan juga diangkat oleh Napoléon Bonaparte (Pasal 63; (Grimal 1969: 93)).

⁴ *Commune* adalah tingkat satuan administratif di Prancis yang mewakili satu kampung atau dukuh.

c. Sistem Pemerintahan Prancis Berdasarkan Konstitusi 28

Floréal Tahun XII (18 Mei 1804).

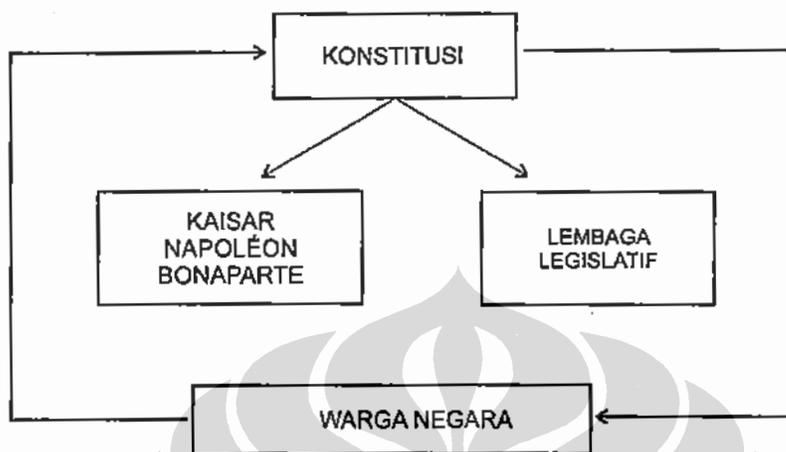
Prancis mengalami masa damai setelah berhasil mendesak Inggris untuk melakukan gencatan senjata dan menandatangani perjanjian Amiens pada tanggal 25 Maret 1802. Kelelahan bangsa Prancis akibat perang melawan Inggris sementara terobati. Peperangan antara kedua negara adidaya itu telah berlangsung lama, dimulai pada Perang Seratus Tahun (*La Guerre de Cent ans*) pada tahun 1328 hingga 1453. Pada abad XVI, Prancis tidak mau ketinggalan dari bangsa Eropa lainnya yang telah melakukan ekspedisi dalam rangka menemukan dunia baru. Ekspedisi ke Canada membuahkan peperangan kembali antara Prancis dan Inggris. Konflik-konflik terus berlanjut hingga masa Louis XIV berkuasa. Pada masa ini Prancis harus menyerahkan beberapa wilayah koloninya di Amerika kepada Inggris. Persaingan antardua negara itu mencapai puncaknya ketika Louis XV berkuasa (1710–1774). Pada masa ini terjadi beberapa kali peperangan dengan Inggris, antara lain: perang pewaris tahta Austria (1740–1748), Perang Tujuh Tahun (*La guerre de sept ans*) yang berlangsung antara tahun 1756 dan 1763 dan perang kemerdekaan Amerika tahun 1775–1782). Pada perang-perang tersebut armada Prancis selalu berhadapan dengan armada Inggris (Hinnewinkel 1981:64–68); (Burns 1958:510–512).

Keberhasilan Napoléon memaksa Inggris untuk menandatangani perjanjian Amiens pada tahun 1802 disambut gembira oleh rakyat Prancis. Koran-koran Prancis setiap hari tak henti-hentinya menyanjung Napoléon dan meminta agar Napoléon dipertahankan sebagai pemimpin Prancis.

Namun, pada awal tahun 1804, terjadi upaya pembunuhan terhadap Napoléon yang dilakukan oleh dua orang warga Prancis yang bernama Cadoudal dan Hyde de Neuville. Upaya pembunuhan ini gagal dan pelakunya berhasil ditangkap. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata mereka adalah pembunuh bayaran suruhan Jenderal Pichegru dan Moreau. Rencana pembunuhan itu dimaksudkan untuk mendirikan kembali kerajaan Prancis di bawah kekuasaan Louis XVIII. Akhirnya, kedua pembunuh bayaran itu dihukum mati, sementara Jenderal Pichegru mati karena bunuh diri dan Moreau menjalani hukuman yang berupa pembuangan ke Amerika Serikat. Akibat dari rencana pembunuhan ini, koran-koran di Prancis setiap hari mendesak Napoléon untuk tetap memimpin Prancis dan menjaga kelangsungan hidup negara Prancis.

Dukungan masyarakat Prancis terhadap Napoléon mencapai puncaknya ketika *Tribunat* (wakil rakyat di parlemen) mengusulkan agar Napoléon diangkat menjadi raja Prancis pada tanggal 3 Mei 1804. Usulan ini mendapatkan sambutan yang luar biasa dari Senat, terbukti

Gambar 5. Struktur Kekuasaan Kaisar Prancis Berdasarkan Konstitusi 1804



dua hari kemudian anggota Sénat dan Tribunat berkumpul untuk menyusun konstitusi baru bagi Prancis yang akan mengangkat Napoléon Bonaparte menjadi Raja Prancis. Setelah Senat meminta pendapat rakyat melalui referendum, ternyata 3,5 juta rakyat Prancis menyetujuinya, sedangkan 2.537 orang menolaknya (Hinne-winkel 1981:84).⁵

Masa pemerintahan kekaisaran Napoléon disebut sebagai masa *Premier Empire* (Kekaisaran Pertama). Selama ia menjadi kaisar, kekuasaannya dibatasi oleh konstitusi. Pengangkatannya menjadi kaisar seumur hidup ditetapkan oleh konstitusi. Dengan demikian, peme-

rintahannya bukanlah kekaisaran yang monarki absolut, melainkan pemerintahan kekaisaran monarki konstitusional. Dari semua konstitusi semasa Napoléon, konstitusi ini merupakan konstitusi yang paling panjang, terdiri atas 16 bab yang dirinci menjadi 142 pasal. Isi yang paling penting dari konstitusi ini adalah perubahan bentuk negara dari sistem republik menjadi kekaisaran dan pengangkatannya menjadi Kaisar Prancis. (Godechot, *idem*:180).

Konstitusi 18 Mei 1804 dibuka dengan pasal perubahan sistem pemerintahan Prancis menjadi Kekaisaran yang bernama Kekaisaran Prancis (*Empereur des Français*) dan penunjukan Napoléon Bonaparte sebagai Kaisar Prancis (pasal 1 dan 2). Organisasi pemerintahan berdasarkan konstitusi ini tidak banyak berubah dengan

⁵ Godechot (1970:180) menyebutkan bahwa jumlah suara yang tidak menyetujui penangkatan ini sebesar 2.596 orang.

konstitusi sebelumnya. Kekuasaan kepala negara bertambah besar. Bahkan, di tahun 1806 Kaisar Prancis memiliki hak untuk menafsirkan undang-undang, yang seharusnya menjadi hak dari lembaga legislatif. Demikian pula untuk menyatakan perang, menandatangani perjanjian, perdagangan dengan negara lain yang seharusnya dikonsultasikan kepada lembaga legislatif, tidak dilakukannya. Lembaga legislatif tidak berfungsi sama sekali, yang menyebabkan Napoléon memerintah sendiri. Namun demikian, dari sudut kehidupan ketatanegaraan, ada dua hal yang dianggap baru dalam konstitusi ini, yaitu memberikan wewenang kepada Senat untuk menghargai kebebasan individu (pasal 60) dan mengawasi kebebasan pers (pasal 64). Untuk memantau kedua hal ini, Senat membentuk komisi khusus yang beranggotakan 7 orang. Kedua komisi ini diperbaharui setiap empat bulan. Penguatan lembaga eksekutif dilakukan setelah parlemen memberikan hak kepada Kaisar Prancis pada tahun 1806 untuk menafsirkan sendiri undang-undang, yang seharusnya menjadi hak lembaga legislatif.

Kedudukan Napoléon dalam Konstitusi

Selama Napoléon berkuasa, terjadi pergantian konstitusi sebanyak 3 kali, yakni konstitusi pemerintahan Konsulat 22 *Frimaire* tahun VIII (13 Desember 1799), konstitusi Konsul 16 *Thermidor* tahun X (4 Agustus 1802),

dan konstitusi 28 *Floréal* Tahun XII (18 Mei 1804), yang mengubah sistem pemerintahan dari sistem republik menjadi sistem kerajaan.

a. Kedudukan Napoléon dalam

Konstitusi 22 Frimaire Tahun VIII

Konstitusi ini menetapkan sistem pemerintahan di Prancis menganut sistem republik, yang satu dan tak terpisah-pisah (pasal 1). Sebagai sebuah negara yang menganut sistem republik, kepala negara dipegang oleh 3 konsul yang masa jabatannya berlangsung selama 10 tahun dan tidak dapat dipilih kembali.

Tertulis bahwa konstitusi telah mengangkat Napoléon, mantan konsul sementara, sebagai Konsul Pertama. Mantan Menteri Peradilan Cambacérés, diangkat sebagai Konsul Kedua, dan Lebrun, mantan Dewan Kepurbakalaan diangkat menjadi Konsul Ketiga. Khusus Konsul ketiga, masa jabatannya hanya 5 tahun (pasal 39). Konsul Pertama memiliki tugas khusus, yang akan dibantu oleh salah satu atau kedua konsul lainnya (pasal 40). Sebagai Konsul Pertama, ia memiliki hak seperti tertuang pada pasal 41, yaitu hak untuk mensahkan undang-undang. Selain itu, berdasarkan pasal ini pula, ia juga berhak menunjuk dan mengangkat: anggota Dewan Pensasehat negara (*Conseil d'Etat*), para menteri, duta besar dan kepala perwakilan pemerintah di luar negeri, pejabat angkatan darat, pejabat angkatan laut, pejabat administratif di daerah, dan pejabat tinggi

pengadilan. Ia juga memiliki hak untuk mengangkat para hakim untuk mengadili pelaku kriminal, hakim perdata, dan hakim kasasi.

Sementara berdasarkan pasal 42, konsul kedua dan ketiga berfungsi sebagai penasihat bila diperlukan, dan turut serta menandatangani dan mencatat akte, sebagai tanda persetujuannya. Apabila konsul pertama menghendaki, mereka bisa memberikan pertimbangannya.

Dalam konstitusi ini juga ditetapkan lembaga-lembaga tertinggi negara yang akan membantu pemerintah dalam melaksanakan pemerintahannya. Tugas-tugas pemerintah diuraikan dari pada pasal 43 hingga 59. Tugas lembaga peradilan (*Tribunal*) diuraikan secara khusus pada Bab V, dari pasal 60 sampai dengan 68. Bab VI mengatur tanggung jawab para pegawai tinggi pemerintah, yang diatur dalam pasal 69 sampai dengan 75. Sementara itu, pada bab VII diatur tentang disposisi umum bagi kesejahteraan warga negara Prancis, seperti perlindungan terhadap setiap warga negara, pengaturan wilayah koloni yang akan diatur dalam peraturan tersendiri. Dalam pasal ini (pasal 92) juga ditegaskan apabila terjadi pemberontakan dari angkatan bersenjata atau bila terjadi ancaman yang membahayakan kedaulatan negara, maka pemerintah dapat mengumumkan negara dalam keadaan darurat, dan diizinkan untuk membuat peraturan sendiri demi penyelamatan negara dan bangsa Prancis.

Hirarki konsul pertama, kedua dan ketiga sangat jauh. Hal ini terbukti dari masa jabatan dari tiap-tiap konsul. Masa jabatan konsul pertama sama dengan konsul kedua. Sementara konsul ketiga masa jabatannya berbeda dengan konsul pertama dan kedua. Konsul pertama memiliki hak yang sama dengan hak yang dimiliki kepala negara, seperti memberikan grasi, mengangkat dan menerima duta besar, mengangkat wakil pemerintah yang ditugaskan di luar negeri. Hak ini tidak dimiliki oleh konsul kedua.

Pencantuman nama orang dalam konstitusi adalah sesuatu yang tidak lazim dalam konstitusi. Pencantuman nama orang ini menunjukkan demikian kuatnya figur tokoh sentralnya, yaitu Napoléon dalam konstelasi politik dalam negeri di Prancis saat itu. Keputusan parlemen dianggap tidak cukup kuat untuk menetapkan para konsul sebagai kepala pemerintahan di negeri ini. Dengan demikian, bila salah satu konsul tidak dapat menjalankan tugasnya, berhalangan baik sementara maupun seterusnya, konsekuensi logis yang harus dilakukan adalah mengganti konstitusi dengan konstitusi yang baru.

b. Kedudukan Napoléon dalam Konstitusi 16 Thermidor Tahun X (4 Agustus 1802)

Konstitusi tanggal 16 *Thermidor* tahun X (4 Agustus 1802) tidak berbeda banyak dengan konstitusi sebelumnya. Perubahan utama terjadi

pada kedudukan Konsul Pertama. Pengangkatan Napoléon sebagai Konsul Seumur Hidup tidak didasarkan atas keputusan parlemen, tetapi didasarkan atas referendum. Secara politis, referendum yang merupakan pendapat rakyat kedudukannya sangat kuat. Tidak ada satu keputusan pun dari lembaga tinggi negara yang dapat membatalkan keputusan itu, kecuali dengan referendum. Tampak jelas, Napoléon dengan konstitusi ini ingin memperkuat lembaga eksekutif yang dipegangnya. Hasil referendum yang dilaksanakan pada tanggal 20 *Floréal* tahun X (10 Mei 1802), langsung disambut dengan Keputusan Sénat berdasarkan keputusan tanggal 14 *Thermidor* tahun X (2 Agustus 1802). Keputusan lembaga legislatif Senat yang dikeluarkan pada tanggal itu berisi tiga butir. Butir pertama menyebutkan bahwa rakyat Prancis mengangkat dan Senat memproklamkan Napoléon sebagai Konsul Seumur Hidup (*Consul à Vie*). Butir kedua menegaskan bahwa keputusan itu akan membawa Prancis ke dalam alam perdamaian dan kemenangan yang akan didukung oleh seluruh bangsa Prancis. Butir ketiga berisi tentang kepercayaan Senat kepada Napoléon disertai rasa kecintaan dan kekaguman rakyat Prancis kepadanya.

Kedudukan Napoléon sebagai orang yang menduduki jabatan tertinggi di bidang eksekutif, hak-haknya ditingkatkan dan dikuatkan. Penguatan kekuasaan eksekutif dimulai dari wilayah yang kecil setingkat

canton. Pengangkatan Ketua Dewan Kelurahan di tingkat wilayah hingga pengangkatan Ketua Dewan di tingkat nasional dilakukan oleh Konsul Pertama. Ia juga merangkap sebagai anggota Sénat dan menjadi salah satu ketuanya. Sementara konsul kedua dan ketiga diangkat oleh Sénat atas usulannya.

Dalam konstitusi ini tidak ada lagi pencantuman nama para konsul. Namun, penentuan jabatan Konsul Seumur Hidup kedudukannya lebih tinggi dari lembaga tinggi negara, karena merupakan aspirasi langsung rakyat. Oleh karena itu, walaupun konsul kedua dan ketiga diangkat oleh Sénat, tetapi usulan nama calonnya tetap berasal dari Konsul Pertama.

c. Kedudukan Napoléon dalam Konstitusi 28 *Floréal* Tahun XII (18 Mei 1804)

Dua tahun setelah diberlakukannya konstitusi tanggal 16 *Thermidor* tahun X, bangsa Prancis mengganti kembali konstitusinya dengan konstitusi tanggal 28 *Floréal* tahun XII (18 Mei 1804). Konstitusi ini mengubah sistem pemerintahan di Prancis dari sistem republik menjadi sistem kerajaan yang berdasarkan konstitusi, atau sering disebut dengan sistem monarki konstitusional. Dalam bab I yang berisi dua pasal disebutkan bahwa Pemerintah Prancis mempercayakan kepala pemerintahannya kepada Kaisar, yang bergelar Kaisar Rakyat Prancis (*Empereur des Français*).

Keadilan berada di tangan Kaisar melalui pejabat-pejabat yang ditunjuknya. Pasal 2 menyebutkan bahwa Napoléon, yang menjabat sebagai Konsul Republik hingga saat itu, diangkat menjadi Kaisar Prancis.

Bab II konstitusi ini mengatur tentang keturunan kaisar. Berhubung Kaisar tidak memiliki anak laki-laki, maka ia diberikan hak untuk mengangkat anak atau cucu yang akan menjadi pewaris tahta. Hasil adopsi ini akan diakui sebagai keturunan kaisar yang sah. Sementara adopsi yang dilakukan oleh keturunan dan ahli warisnya dilarang. Sebagai keturunan langsung Napoléon, negara mengakui Joseph Bonaparte, kakak kandung Napoléon sebagai keturunan langsung Kaisar, di samping Louis Napoléon Binaparte, adik kandung laki-laki yang juga diakui sebagai keturunan langsung Kaisar. Mereka berdua berdasarkan konstitusi memperoleh gelar pangeran (pasal 15).

Parlemen Prancis (*Sénat*) berdasarkan pasal 57, terdiri atas para pangeran kerajaan, petinggi kerajaan, 80 orang anggota yang ditunjuk oleh Kaisar, dan warga negara biasa yang telah memperoleh rekomendasi dari Kaisar (pasal 57). Pengangkatan ketua Senat pun dilakukan langsung oleh Kaisar (58).

Selain lembaga legislatif yang berada di bawah kekuasaannya, lembaga yudikatif (*Tribunat*) juga berada di bawah kendalinya. Masa jabatan anggota *Tribunat* berlangsung selama 10 tahun. Setiap 5 tahun

separuh anggotanya diperbaharui. Calon kepala lembaga peradilan dipilih oleh Sénat sebanyak tiga orang, salah satu di antaranya akan diangkat oleh Kaisar menjadi Kepala lembaga peradilan.

Dengan demikian, pada masa kekasaran Prancis yang berlangsung dari tahun 1804 hingga 1814, semua lembaga kenegaraan baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif di bawah kendalinya. Sentralisme administrasi pemerintahan dan politik berada di tangannya, sementara untuk tingkat di bawahnya berada di tangan *préfet* yang harus mengatasnamakan Kaisar Prancis (Bertaud 1989 : 93).

Dengan kedudukan yang diperolehnya, Napoléon berhasil mengendalikan angkatan bersenjata. Ia berhasil membentuk pasukan yang besar yang disebutnya sebagai *Grande Armée*. Dari tahun 1800 -1815, ia berhasil untuk membentuk pasukan yang jumlahnya mencapai 1.600.000 orang. Kekuatan pasukan ini terletak pada kecepatan infanterinya, kedahsyatan artilerinya, penyediaan kavaleri dan penggantiannya serta kepiawaian komandannya (Nembrini 1985 : 95).

Dari tahun 1805 hingga 1809, ia berhasil memenangkan peperangan. Di Austerlitz misalnya, pasukan Prancis mampu mengalahkan pasukan Austria dan Rusia. Pertempuran di Iéna mampu mengalahkan pasukan Prusia. Hanya tinggal Inggris yang belum mampu dikalahkannya. Oleh karena itu, ia sangat berambisi menaklukkan Inggris, satu-satunya musuh

yang belum berhasil ditaklukkannya melalui penghancuran perekonomiannya, khususnya dari sektor perdagangan. Cara yang digunakannya yaitu dengan menciptakan sistem kontinental. Ada tiga hal yang dilakukan oleh Napoléon untuk menjalankan gagasannya ini, yakni: *pertama*, melakukan politik *Blocus Continental*, yaitu menutup semua kesempatan baik secara sukarela maupun dengan kekuatan berdagang dengan Inggris dengan cara menutup pelabuhan di seluruh Eropa terhadap kapal Inggris; *kedua*, mendirikan pabrik di wilayah Eropa yang memproduksi barang-barang yang diproduksi Inggris; *ketiga*, menciptakan perdamaian maritim dan kebebasan melaut bagi kapal-kapal Eropa maupun koalisinya (Latreille 1974 : 192-193).⁶

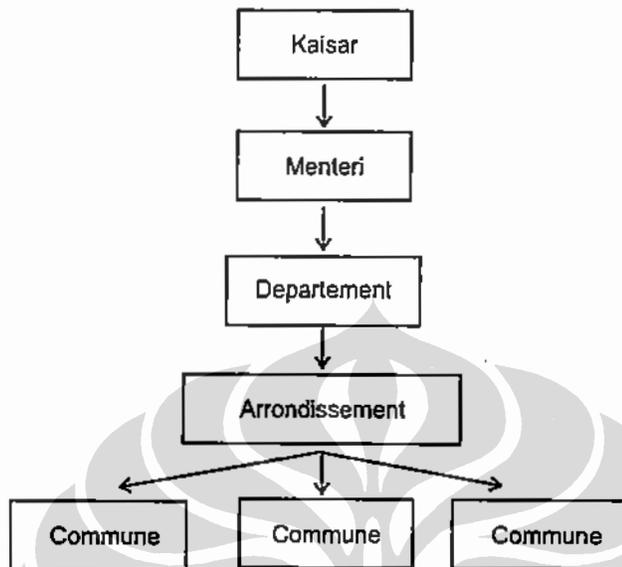
Napoléon melakukan pembenahan administratif, baik di tingkat pusat maupun daerah. Penentuan pejabat tinggi negara yang semula dilakukan

dengan sistem pemilihan digantikan dengan sistem pengangkatan. Negara melakukan pengawasan yang ketat terhadap pejabat administrasi negara. Sebagai akibatnya Prancis menjadi negara yang sangat sentralistik. Ia membagi wilayah Prancis menjadi beberapa wilayah administrasi, antara lain : *départements, arrondissements, dan communes*. Pimpinan tinggi di daerah selalu ditunjuk oleh pemerintah seperti : *préfets, sous-préfets, maires des villes* (Berstein 1978 : 34). Di setiap *département* ditempatkan seorang komandan militer yang bertugas membantu *préfet* dalam menjalankan tugasnya. *Préfet* dan komandan militer tidak dapat dicalonkan menjadi anggota Senat karena tugas-tugasnya itu (pasal 100 konstitusi 1804).

Di bidang lain, banyak perubahan dilakukan Napoléon. Jabatan hakim (*magistrat*) tidak lagi dipilih, tetapi diangkat oleh pemerintah. Pendirian Banque de France (Bank Sentral Prancis) tahun XI (1803) sangat mendorong kemajuan perekonomian Prancis secara keseluruhan, karena bank ini menciptakan alat pembayaran sah (*franc*) yang nilainya sangat stabil. Fungsi bank sentral ini adalah mencetak uang dan meminjamkan uang ke bank lainnya. Dengan majunya perekonomian Prancis, hutang pemerintah menjadi berkurang dan secara bertahap terlunasi. Berkat pengaturan moneter yang baik, neraca anggaran dan pendapatan negara menjadi stabil.

⁶ Berdasarkan dekrit Berlin yang ditandatangani Napoléon Bonaparte, Inggris dinyatakan diblokade (pasal 1); semua produk buatan Inggris atau toko-toko milik orang Inggris dimusnahkan (pasal 2), mencari alternatif produk yang diproduksi oleh Inggris seperti gula (Prancis memanfaatkan gula bit (*betterave*) untuk dijadikan gula). Akibat dari *Blocus Continental* ini, muncul protes dari pelaku bisnis kelautan yang meminta kebebasan untuk melaut dan berkurangnya jumlah kapal yang merapat di pelabuhan Bordeaux. Jumlah kapal yang merapat tahun 1807 ada 121 kapal, tahun 1811 tinggal 8 kapal saja. (Nembrini : 100-101)

Gambar 6. Struktur Pemerintahan Kaisar Prancis Berdasarkan Konstitusi 1804



Kesimpulan

Berdasarkan uraian tentang kedudukan Napoléon dalam konstitusi Prancis, dapat disimpulkan penulisan nama seseorang atau sekelompok orang dalam konstitusi adalah sesuatu yang tidak lazim. Hal ini terjadi dalam konstitusi Prancis pada saat Napoléon berkuasa. Sementara itu dalam konstitusi Prancis lainnya, penulisan semacam itu tidak pernah terjadi hingga kini. Pencantuman nama dalam jabatan Konsul, konsul pertama, kedua dan ketiga) untuk konstitusi zaman Konsulat dan dalam jabatan kaisar untuk konstitusi zaman kekaisaran, menunjukkan bahwa Napoléon mendapatkan tempat yang sangat tinggi bagi bangsa Prancis saat itu. Kedudukannya tidak dapat

digantikan oleh siapa pun dan tidak pernah dialami oleh pemimpin bangsa Prancis lainnya.

Kepemimpinan Napoléon sejak zaman pemerintahan Konsulat hingga kekaisaran membawa Prancis menjadi bangsa yang besar. Dengan alasan menjaga keselamatan Revolusi Prancis, semangat ekspansionisme Napoléon atas negara-negara yang berdaulat di Eropa menjadi tidak terkontrol. Hampir semua negara di Eropa dikuasainya selama periode itu. Batas geografis antarnegara Eropa berubah total.

Namun, ambisi Napoléon untuk menjadi satu-satunya penguasa di Eropa tidak pernah menjadi kenyataan. Inggris adalah satu-satunya negara yang tidak pernah dikalahkan

oleh Prancis. Upaya untuk menakkannya telah dilakukan, termasuk melakukan sistem kontinental yang melarang kapal-kapal Inggris mendarat di sepanjang pantai Eropa. Upaya mengganti barang-barang produksi Inggris dengan memproduksi sendiri barang-barang itu hasilnya juga tidak memuaskan. Blokade atas kapal-kapal Inggris menjadikan hampir semua kegiatan di pelabuhan di Prancis lumpuh. Pelabuhan Le Havre dan Bordeaux mengalami dampak langsung blokade Prancis atas kapal-kapal Inggris itu, sehingga menimbulkan protes yang sangat keras dari para pebisnis di kedua pelabuhan itu.

Prancis berhasil menjadi salah satu negara adi daya di Eropa berkat pasukan *Grande Armée* yang dibentuknya. Dengan adanya ekspansi ke wilayah lain, Napoléon memerlukan penambahan jumlah tentara. Mobilisasi tentara dikerahkan. Penduduk yang tidak ikut berperang harus membayar pajak. Bahkan Napoléon mendesak Raja Spanyol untuk menyerahkan kembali wilayah Louisiana di Amerika Utara melalui perjanjian San Ildefonso yang dilakukan pada tahun 1800. Wilayah itu akhirnya dijual kepada Amerika Serikat dengan harga 15 juta US\$. Uang itu digunakan untuk membiayai perang-perang Napoléon ini.

Konflik antara Napoléon dan Louis yang saat itu diangkat menjadi Raja Belanda (1806–1810), juga disebabkan oleh tidak bersedianya Louis

menaikkan pajak yang dibebankan kepada rakyat Belanda. Permintaan Napoléon agar Louis mengirimkan tentaranya untuk bergabung dengan tentara *Grande Armée* juga ditolaknya, sehingga Louis dianggap sebagai pembangkang dan diturunkan dari tahtanya pada bulan Juli tahun 1810.

Pemberian wewenang yang tidak terbatas, memberikan kesempatan bagi Napoléon untuk membangun negerinya. Pembagian sistem administratif di Prancis ditata secara baik dengan menggunakan sistem sentralisasi. Hal ini membawa kesejahteraan bagi warga Prancis. Negara mampu menjaga kesatuan wilayah Prancis dengan cara membagi wilayah itu menjadi satuan wilayah administratif yang lebih kecil untuk menjamin persamaan hak dan keadilan bagi semua warga negara Prancis. Sistem sentralisasi yang dibangun oleh Napoléon tidak terbatas pada wilayah Prancis saja. Pada tahun 1805, ia telah berhasil membangun jalan yang menghubungkan Paris dengan 25 kota lain di Eropa. Jalan transnasional ini dibangun untuk memperpendek waktu tempuh kota-kota itu, dan memanfaatkan sarana komunikasi dari Paris ke wilayah lainnya dengan memfungsikan jalan itu sebagai jalan pos yang menghubungkan hampir semua kota di Eropa.

Napoléon telah membawa bangsa Prancis menjadi bangsa yang besar dalam arti yang sesungguhnya. Konstitusi dan lembaga negara lain tidak mampu membendung idenya menjadi-

kan Prancis sebagai negara yang besar. Wilayah Prancis menjadi sangat luas, sehingga pengaruh Prancis berada hampir di semua negara Eropa. Napoléon telah berhasil mengintegrasikan beberapa wilayah Eropa menjadi satu wilayah kesatuan Prancis sesuai dengan titel yang digunakannya, yaitu Kaisar Bangsa Prancis, Presiden Italia, dan Pelindung Persekutuan Rhin. □

BIBLIOGRAFI

- Alba, Andre, Jules Isaac, Jean Michaud, Ch. H. Pouthas. 1960. *Les Révolutions 1789 – 1848*. Paris : Marabout.
- Albrow, Martin. 1996. *Birokrasi Terj.* Oleh M. Rusli Karim dan Totok Daryanto *Bureaucracy*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
- Bertaud, Jean-Paul. 1989. *Le Consulat et Empire 1799 – 1815*. Paris : Armand Collon
- Furet, François dan Denis Richet. 1973. *La Révolution Française*. Paris : Librairie Hachette
- Grimal, Henri dan Lucien Moreau. 1969. *Histoire de la France*. Paris : Fernand Nathan Éditeur.
- Hinnewinkel, MJ, JC Hinnewinkel, JM Sivirine, M. Vincent. 1981. *Découvrir, Comparer, Connaître Histoire CM*. Paris : Armand Collin.
- Nembrini, JL, P. Polivka, J. Bordes. *Histoire CM*. Paris : Hachette Classiques.
- Marihandono, Djoko, 2005. *Sentralisme Kekuasaan Pemerintahan Herman Willem Daendels di Jawa 1808 – 1811 : Penerapan Instruksi Napoléon Bonaparte*. Jakarta : Disertasi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Tidak diterbitkan.
- Rémond, René. 1965. *L'Ancien Régime et la Révolution 1750 – 1815*. Paris : Collection Histoire.